

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman yang semakin berkembang ini permasalahan sampah masih menjadi salah satu fokus utama, banyaknya permasalahan lingkungan yang berawal dari pencemaran lingkungan membuat beberapa daerah menjadi sasaran. Banyak daerah yang memiliki tingkat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan bahkan, tempat wisata yang harusnya dipenuhi keindahan itu kini nyaris tertutup oleh sampah. Bagaimana tidak? Jika sampah terus terusan dibiarkan berserakan, kurangnya fasilitas umum seperti tempat pembuangan sampah di beberapa titik serta kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat maka masalah tersebut akan tetap menjadi momok.

Menurut sistem informasi pengelolaan sampah nasional (SIPSN) pada tahun 2024 Indonesia menghasilkan produksi sampah sebanyak **37,311,750.55** ton/tahun yang berasal dari 342 kabupaten/kota se Indonesia. Pada provinsi Jawa Timur sendiri produksi sampah mencapai **6,394,458.47** ton/tahun dan **17,519.06** ton/bulan sementara pada kabupaten Pamekasan timbulan sampah **102,470.10** ton/tahun dan **280.74** ton/bulan.

Pesisir pantai Madura merupakan salah satu wilayah yang sudah memiliki potensi ekonomi dan lingkungan yang besar, namun juga menghadapi berbagai risiko lingkungan yang signifikan. Salah satu isu utamanya adalah masalah pengelolaan sampah dan pencemaran laut yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem laut. Selain itu, kerusakan mangrove dan abrasi pantai juga menjadi ancaman serius bagi masyarakat pesisir Madura. Dalam konteks ini komunikasi lingkungan berperan sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan laut untuk mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Namun, masih banyak tantangan dalam mengomunikasikan isu lingkungan terhadap masyarakat, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Realitas yang terjadi di pesisir Madura mencerminkan betapa seriusnya persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat setempat. Di pesisir Tlanakan, Pamekasan, tumpukan sampah berserakan dengan beragam jenis, mulai dari popok bayi sekali pakai, bungkus plastik, botol air mineral, ban bekas, hingga tali temali perahu nelayan, sementara bibit mangrove tidak tampak sama sekali di tepian laut. Kondisi ini bukan sekadar persoalan estetika, melainkan ancaman nyata bagi ekosistem pesisir. Sampah-sampah tersebut tidak hanya berasal dari warga sekitar, tetapi juga merupakan kiriman dari daerah lain yang terbawa arus sungai hingga ke muara laut.

Kerusakan mangrove menjadi salah satu dampak paling nyata dari kondisi tersebut. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, kerusakan mangrove di Madura mencapai 9.179 hektar, baik di luar maupun di dalam kawasan. Dari total luas mangrove Madura sebesar 15.118,2 hektar yang tersebar di empat kabupaten — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — sebanyak 41,8 persen atau sekitar 6.324,1 hektar berada dalam kondisi rusak. Penyebab utama kerusakan ini adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, bangunan, dan permukiman, sementara abrasi terus mengancam wilayah pesisir akibat menurunnya luasan mangrove itu sendiri.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan nelayan dan masyarakat sekitar. Laut yang tercemar membuat hasil tangkapan ikan menurun, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Sampah yang menutupi jaring atau alat tangkap memaksa nelayan mengeluarkan biaya tambahan untuk perbaikan alat dan bahan bakar, karena area tangkapan yang masih efektif semakin menjauh. Selain itu, sampah yang menumpuk di pesisir menimbulkan bau tidak sedap, mencemari sumber air, serta menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, menjadikan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang paling rentan terdampak.

Di sisi lain, upaya penyelamatan lingkungan mulai dilakukan oleh sebagian kalangan masyarakat. Koordinator OISCA Madura menyuarakan perlunya imbauan dari pemerintah setempat tentang larangan membuang sampah ke pantai, serta penyediaan fasilitas tempat sampah dan pemasangan papan peringatan di kawasan pesisir. Namun demikian, tantangan terbesar tetap terletak pada belum meratanya kesadaran masyarakat serta belum optimalnya efektivitas komunikasi lingkungan dalam mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya komunikasi telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak, perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara menyeluruh sehingga permasalahan sampah masih terus ditemukan.

Sampah yang tidak terkelola sering kali berakhir di sungai, pantai, dan laut, menyebabkan pencemaran air serta mengancam ekosistem. Di salah satu kawasan pesisir misalnya, tumpukan sampah plastik menjadi ancaman serius bagi biota laut seperti ikan, karang, dan burung laut. Selain itu, pembakaran sampah secara terbuka yang masih banyak dilakukan masyarakat justru memperparah pencemaran udara dan memicu munculnya berbagai penyakit pernapasan padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Melalui pendekatan komunikasi lingkungan yang efektif, masyarakat dapat diajak untuk memahami dampak buruk pencemaran, menumbuhkan rasa tanggung jawab ekologis, serta mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat, diharapkan upaya pengelolaan sampah dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi terhadap tercapainya pembangunan berwawasan lingkungan.

Salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan tersebut adalah kawasan Wisata Pelabuhan Branta di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Pelabuhan tersebut memiliki fungsi ganda yang unik, yaitu sebagai pusat aktivitas kapal penyebrangan, nelayan

dan destinasi wisata bahari yang ramai dikunjungi. Namun, di tengah potensi ekonominya yang besar, kawasan ini menghadapi masalah lingkungan yang cukup serius, yang digambarkan sebagai "Darurat sampah". Fenomena tersebut sudah cukup ramai di perbincangkan, Laporan menunjukkan adanya tumpukan sampah yang menggunung dan berserakan, terdiri dari limbah rumah tangga, sampah plastik, dan sisa-sisa industri, yang mencemari lingkungan, dan merusak pemandangan, serta menimbulkan bau menyengat yang meresahkan warga dan nelayan. Data produksi sampah pada kawasan tersebut diperkirakan mencapai **55456**.

Permasalahan ini diperburuk oleh temuan yang kontradiktif: meskipun Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Branta Pamekasan telah menyediakan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R), fasilitas tersebut tidak berfungsi secara optimal. Banyak temuan yang menunjukkan bahwa masyarakat setempat cenderung tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk membuang sampah secara ilegal di sekitar pelabuhan, bahkan secara diam-diam pada dini hari. Kondisi ini diperkuat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pamekasan, Supriyanto, yang menyayangkan "rendahnya kesadaran masyarakat" dalam menjaga kebersihan lingkungan (Ziyad/Sl, 2025).

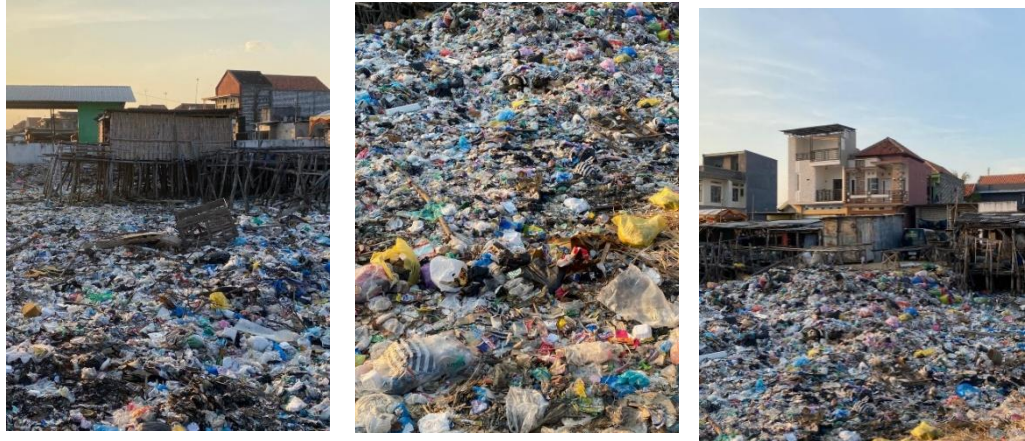
Fenomena di Pelabuhan Branta menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah tersedia fasilitas dan berbagai upaya komunikasi lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat belum sepenuhnya terbentuk sehingga diperlukan penguatan komunikasi lingkungan yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara lebih berkelanjutan. Berbagai jenis sampah ditemukan mengapung di area pesisir pelabuhan tersebut seperti, sampah plastik, botol, serta limbah rumah tangga. Masyarakat sekitar banyak mengeluhkan tentang bau tidak sedap yang timbul dari masalah tersebut, serta mereka juga mengkhawatirkan saat volume air semakin tinggi maka secara otomatis sampah yang tergenang

juga ikut naik, sehingga menyebabkan daerah tersebut semakin tertimbun sampah.

Permasalahan di Pelabuhan Branta secara langsung mengarah pada dua konsep kunci yang saling terkait “komunikasi lingkungan dan partisipasi masyarakat”. Komunikasi lingkungan didefinisikan sebagai "Penyebaran informasi dan implementasi praktik komunikasi yang terkait dengan lingkungan" Lebih dari sekadar penyampaian pesan, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran, mengubah sikap, dan mendorong partisipasi aktif. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, terutama yang bersifat dialogis, dapat menciptakan ruang publik di mana masyarakat merasa terlibat dalam pengambilan keputusan dan akhirnya menunjukkan perilaku yang lebih baik terkait pengelolaan sampah.

Partisipasi masyarakat di sisi lain, adalah keterlibatan aktif dan sukarela dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*). Tingkat partisipasi dipengaruhi oleh tiga faktor utama: kemauan (motivasi internal), kemampuan (pengetahuan dan keterampilan), dan kesempatan (kondisi lingkungan yang mendukung). Kurangnya partisipasi masyarakat di Pelabuhan Branta, terlepas dari keberadaan fasilitas (kesempatan), menyiratkan adanya masalah pada faktor kemauan dan kemampuan, yang sangat mungkin disebabkan oleh kegagalan komunikasi. Menurut (Wahyudin, 2017), permasalahan lingkungan tidak cukup diatasi dengan tindakan penyelamatan ataupunanggulangan bencana semata, melainkan membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kelestarian alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi lingkungan yang mampu menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat maupun industry dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tinjauan Komparatif Membandingkan Pelabuhan Branta dengan Studi Kasus Lain untuk memahami lebih dalam yang terjadi di Pelabuhan Branta, penting untuk membandingkannya dengan inisiatif pengelolaan



Gambar 1.1. penumpukan sampah di pelabuhan Branta

sampah yang berhasil, bahkan yang berada di wilayah Pamekasan itu sendiri. Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup nomor 13 tahun 2012 pasal 1 (2) yang berbunyi “bank sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi” (Admin dlh, 2018).

Model pengelolaan sampah pada kelurahan Parteker, Pamekasan yang berbasis bank sampah berhasil melibatkan masyarakat secara partisipatif sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Proses ini diawali dengan diskusi dengan tokoh masyarakat, diikuti sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis. Demikian pula, di Desa Pamoroh, inisiatif Bank Sampah Hamdalah berhasil menggerakkan masyarakat dengan menawarkan insentif ekonomi, seperti tabungan yang dapat ditukar dengan uang tunai, sembako, atau biaya pendidikan. Studi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan komunikasi yang terstruktur dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk melihat sampah sebagai sumber pendapatan. Keberhasilan di kedua kasus ini terletak pada strategi yang holistik: kombinasi komunikasi persuasif, edukasi, dan insentif ekonomi.

Perbandingan ini menyoroti celah penelitian yang jelas. Meskipun Pelabuhan Branta telah memiliki fasilitas TPS 3R sebagai sarana pengelolaan sampah, pemanfaatannya di lapangan masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas saja belum cukup, tetapi perlu didukung oleh komunikasi lingkungan yang berkelanjutan agar masyarakat terdorong untuk memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Hal tersebut sangat berbeda dengan keberhasilan model bank sampah di kelurahan parteker pamekasan padahal bsama-sama berasal dari satu kabupaten yang sama namun, hasil yang ditunjukkan sangat berbeda. Kegagalan ini bukan karena minimnya infrastruktur, melainkan karena ketiadaan strategi komunikasi dan pemberdayaan yang efektif yang dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara spesifik bagaimana strategi komunikasi lingkungan yang diterapkan, atau yang seharusnya diterapkan, dapat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menanggulangi sampah di kawasan ini. Fenomena tersebut bukan hal baru di Indonesia. Masyarakat berharap bahwa pemerintah setempat lebih memfokuskan masalah sampah yang kini sudah sangat membludak.masayarakat sudah cukup berpartisipasi dalam menangani masalah sampah tersebut, namun mereka juga menyampaikan bahwa tidak semua sampah yang berdiam di sekitar pesisir branta itu sampah rumah tangga mereka, tetapi juga sampah kiriman dari laut.

Sampah kiriman laut tersebut semakin memperparah volume sampah sekitar pelabuhan. Masyarakat setempat sempat mengeluhkan hal tersebut, pasalnya mereka sudah dengan sukarela berusaha membersihkan beberapa titik tumpukan sampah di sekitar bibir pantai namun hal tersebut sekan si-sia mereka lakukan. Sampah kiriman dari laut tersebut tak hanya kali ini mereka temui jika hal tersebut tidak teratasi maka kebersihan di sekitar pelabuhan baranta tidak akan pernah tercapai. Masalah tersebut sudah pasti disebabkan oleh oknum yang melakukan tindakan membuang sampah di laut sehingga sampah tersebut terbawa arus dan berlabuh di pesisir pelabuhan branta.

Masyarakat sekitar sebenarnya telah Mengingat minimnya bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup setempat atau pemerintah daerah, masyarakat mulai mengambil inisiatif untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan musyawarah pemungutan iuran kebersihan sebesar sepuluh ribu rupiah (*RP 10.000*). Namun, banyak di antara mereka yang masih merasa keberatan dengan jumlah tersebut, yang berujung pada tidak terselesaikannya permasalahan sampah tersebut. Salah satu warga desa pesisir branta juga menuturkan bahwa sebenarnya beberapa warga biasanya sering membakar sampah untuk menurangi populasi sampah namun, kebiasaan tersebut juga sudah tidak pernah dilakukan lagi saat ini. Perbedaan antara kemungkinan keterlibatan masyarakat dan fungsi lembaga resmi mengakibatkan situasi ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Pelabuhan Branta masih merupakan masalah serius yang perlu ditangani secara bersama-sama. permasalahan sampah di kawasan tersebut masih menjadi isu serius meskipun telah tersedia fasilitas TPS 3R, Meskipun berbagai bentuk komunikasi lingkungan telah dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, kerja bakti, komunikasi langsung, dan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, permasalahan sampah masih ditemukan di kawasan Pelabuhan Branta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan telah berjalan, namun efektivitasnya dalam membentuk partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan sehingga perlu dikaji lebih mendalam, Peneliti memilih kawasan Pelabuhan Branta sebagai lokasi penelitian karena permasalahan sampah yang terjadi merupakan fenomena yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Sebagai mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura dan bagian dari masyarakat Madura, peneliti merasa penting untuk memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar sebelum mengkaji permasalahan di daerah lain. Kedekatan geografis, sosial, dan budaya tersebut memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memahami kondisi masyarakat secara lebih mendalam, khususnya terkait komunikasi lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian

terhadap upaya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di kawasan pesisir Madura.

Meskipun permasalahan sampah juga terjadi di berbagai daerah lain dengan tingkat pencemaran yang berbeda, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu mengkaji bagaimana komunikasi lingkungan berperan dalam membangun partisipasi masyarakat dalam menanggulangi sampah di kawasan pesisir. Penelitian ini tidak hanya memandang sampah sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga menelaah proses komunikasi yang dilakukan pemerintah desa bersama berbagai pihak dalam membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, komunikasi interpersonal, serta pemanfaatan media komunikasi. Dengan karakteristik kawasan Pelabuhan Branta sebagai pelabuhan sekaligus destinasi wisata, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran komunikasi lingkungan dalam mendorong partisipasi masyarakat serta berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam pengelolaan sampah. Kawasan pelabuhan pesisir memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan wilayah lain karena adanya interaksi antara aktivitas masyarakat, nelayan, dan distribusi barang yang turut berkontribusi terhadap munculnya permasalahan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk komunikasi, namun efektivitasnya dalam membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kebiasaan sebagian masyarakat, rendahnya konsistensi partisipasi, serta adanya faktor eksternal berupa sampah kiriman dari laut.

Penelitian ini menjadi penting karena berusaha mengkaji kesenjangan antara pesan lingkungan yang telah disampaikan dengan perilaku nyata masyarakat. Dengan menggunakan perspektif komunikasi lingkungan, penelitian ini tidak hanya melihat bagaimana pesan lingkungan disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami, dimaknai, dan memengaruhi tindakan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran komunikasi

dalam membangun kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir. Maka dengan permasalahan tersebut peneliti ingin mengangkat “Komunikasi Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Sampah Di Kawasan Pelabuhan Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah, Bagaimana komunikasi lingkungan berperan dalam partisipasi masyarakat dalam menanggulangi sampah di Kawasan Pelabuhan Branta, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komunikasi lingkungan dalam membentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan sampah di Kawasan Wisata Pelabuhan Branta.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai pengembangan teori komunikasi lingkungan dengan melihat bagaimana komunikasi dan partisipasi masyarakat sekitar pesisir pantai.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan konsep yang sama.
3. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman interaksi antara komunikasi sosial dan perilaku lingkungan, sehingga teori komunikasi lingkungan lebih kontekstual dan aplikatif di masyarakat pesisir.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam penanggulangan sampah di Kabupaten Pamekasan, khususnya di kawasan Pelabuhan Branta.

2. Bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Menjadi jembatan informasi bagi Dinas Lingkungan Hidup terkait permasalahan sampah yang terjadi di Pelabuhan Branta, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
3. Bagi Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Branta Memberikan masukan kepada UPP Pelabuhan Branta dalam merumuskan strategi komunikasi lingkungan yang lebih efektif guna menciptakan lingkungan pelabuhan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan.
4. Bagi Pengelola Wisata Menjadi bahan evaluasi terkait pentingnya pengelolaan sampah secara berkala di sekitar kawasan wisata agar tetap terjaga kebersihannya.
5. Bagi Akademisi/Penelitian Selanjutnya Menambah pengetahuan mengenai pentingnya komunikasi dalam membangun partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah sampah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.